



Ketua Dewas IPOSS **Dr. Darmin Nasution** sampaikan sambutan dalam peluncuran buku “Sawit, Anugerah yang Perlu Diperjuangkan”

Sawit: Anugerah?

Sebagai salah satu *think tank* kebijakan kelapa sawit, menerbitkan hasil riset yang antara lain dalam bentuk buku adalah sebuah keharusan IPOSS. Peluncuran buku tentang “Sawit, Anugerah yang Perlu Diperjuangkan” pada 5 September 2024 lalu merupakan hal penting. Selain dihadiri oleh para pakar, sebuah kehormatan Dirut BPD PKS dan Ketua Umum Gapki menjadi pembicara. Selanjutnya, buku ini juga akan dibahas di beberapa kota besar Indonesia sampai akhir tahun 2024.

Secara umum buku menjelaskan bagaimana perkembangan serta tantangan yang dihadapi industri kelapa sawit Indonesia dari masa ke masa serta menguraikan perkembangan sejarah kelapa sawit secara lengkap disertai dengan data-data angka. Sejarah kelapa sawit dari mulai masuk ke Indonesia, periode pengambangan awal, pertumbuhan luas lahan sawit, sampai menjadi produk ekspor dan *booming* di Indonesia dituangkan secara ringan dan jelas sehingga mudah dipahami.

**Selengkapnya di halaman 6*

Kebijakan B50 Berdampak Lingkungan?

Di tengah stagnasi produktivitas kelapa sawit, pemerintah berencana meningkatkan bauran menjadi B50 pada tahun 2025. Rencana ini mencerminkan komitmen Indonesia terhadap keberlanjutan energi dan pengurangan emisi karbon. Namun, peningkatan kebutuhan domestik untuk biodiesel dikhawatirkan tidak hanya akan mengurangi volume ekspor CPO, tetapi juga berpotensi mendorong kerusakan lingkungan di berbagai belahan dunia.

**Selengkapnya di halaman 8*

Dana PSR Jadi 60 Juta, Ampuh?

Melalui keputusan Direktur Utama BPD PKS No 252/dpks/2024, bantuan PSR dari Rp 30 juta menjadi Rp 60 juta per hektare mulai berlaku. Pemerintah berharap, pekebun sawit rakyat yang selama ini merasa kekurangan dana mulai tersenyum riang. Masalahnya, apakah PSR Rp 60 juta itu bisa diharapkan menjadi solusi produktivitas?

**Selengkapnya di halaman 12*



Dr. Sofyan A. Djalil

Editorial

Pemerintah Indonesia terus berupaya mendukung keberlanjutan energi. Tentu upaya tersebut menghadapi tantangan yang tidak mudah. Salah satu kebijakan yang diambil, Pemerintah menambah bantuan PSR menjadi Rp 60 juta per hektare agar produktivitas sawit meningkat. Namun langkah tersebut masih dipertanyakan keefektifannya mengingat banyak aspek lainnya yang harus dibenahi. Dinamika industri sawit demikian adanya. Selamat membaca buletin edisi keenam. Semoga memberikan manfaat.

Ceruk Pasar CPO di Nigeria Layak Digarap



Ilustrasi CPO (dok. istimewa)

Potensi ekspor minyak sawit (CPO) Indonesia ke Nigeria tidak bisa dianggap remeh. Meski saat ini Nigeria baru mengimpor kisaran 94 ribu ton per tahun, namun kedepan berpotensi meningkat dan dapat menggantikan sebagian pasar benua biru Eropa. Namun, untuk memanfaatkan potensi tersebut secara maksimal, diperlukan pemahaman mendalam tentang pasar lokal, strategi pemasaran yang efektif, serta kepatuhan terhadap regulasi dan standar internasional.

Itulah mengapa, Ketua Umum GAPKI, Eddy Martono, menandatangani sebuah nota kesepahaman dengan Asosiasi Produsen Kelapa Sawit Nasional Nigeria (NPPAN) dalam rangka memperkuat kerjasama dan memperluas jangkauan sawit Indonesia di Nigeria. Keduanya bersepakat untuk meningkatkan perdagangan kedua negara khususnya untuk komoditas minyak sawit.

“Penandatanganan MoU ini menjadi langkah penting dalam upaya meningkatkan hubungan ekonomi dan perdagangan antara Indonesia dan Nigeria, khususnya di sektor kelapa sawit,” ujarnya dalam keterangannya di Jakarta, dikutip *Warta Ekonomi*, Minggu (25/8/2024).

Ada yang menarik dari data kedua negara. Indonesia merupakan salah satu produsen minyak sawit terbesar di dunia, dengan luas lahan perkebunan yang terus berkembang pesat. Sedangkan Nigeria, merupakan salah satu negara terbesar di Afrika, juga memiliki kebutuhan besar akan minyak sawit untuk memenuhi permintaan domestik dan industri. Ekspor sawit Indonesia ke Nigeria menawarkan potensi ekonomi yang signifikan, namun juga dihadapkan pada beberapa tantangan.

Sebagaimana diketahui, Nigeria memiliki populasi keenam terbesar di dunia, atau 218 juta orang (detik.com, 6/9/23), yang menciptakan permintaan tinggi untuk berbagai produk makanan, termasuk minyak sawit. Minyak sawit merupakan bahan baku utama dalam industri makanan dan minuman, serta produk konsumen lainnya di Nigeria.

Ekspor sawit ke Nigeria memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk mendiversifikasi pasar ekspor. Walaupun telah memiliki pasar tradisional seperti Eropa dan China, memasuki pasar Nigeria dapat mengurangi risiko pasar dan meningkatkan stabilitas ekonomi.

Dari sisi potensi ekonomi, menurut data CEIC, Nigeria adalah salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi di Afrika (tahun lalu 2,3%). Dengan peningkatan pendapatan dan urbanisasi, permintaan akan produk-produk yang mengandung minyak sawit kemungkinan akan meningkat, membuka peluang baru bagi eksportir Indonesia. Sebagaimana negara berkembang lainnya, Nigeria juga sedang melakukan investasi besar-besaran dalam infrastruktur, termasuk pelabuhan dan jaringan transportasi. Hal ini dapat mempermudah akses dan distribusi produk sawit Indonesia ke berbagai wilayah di Nigeria.

Meskipun terdapat peluang yang lumayan, namun tantangan dalam ekspor Sawit ke Nigeria juga tidak sedikit. Salah satunya karena Nigeria memiliki regulasi dan kebijakan perdagangan yang kompleks. Perubahan kebijakan impor dan tarif dapat memengaruhi biaya dan kelancaran ekspor. Selain itu, terdapat kebutuhan untuk memenuhi standar kualitas dan sertifikasi yang ditetapkan oleh pemerintah Nigeria.

Nigeria sendiri memiliki produksi minyak sawit lokal yang cukup besar, 1,5 juta ton per tahun atau 1,8% dari total produksi dunia (USDA, 2024). Persaingan dengan produk domestik yang lebih murah dapat menjadi tantangan bagi minyak sawit yang diimpor. Oleh karena itu, penting untuk memahami dinamika pasar lokal dan strategi pemasaran yang efektif.

Untuk itulah, membangun kemitraan menjadi salah satu solusi bila ingin mengambil ceruk pasar Nigeria. Kemitraan dengan distributor lokal atau agen pemasaran di Nigeria dapat mempermudah untuk memahami regulasi lokal dan penetrasi pasar. Selain itu, pengembangan produk olahan berbasis sawit yang sesuai dengan selera pasar Nigeria juga menjadi strategi yang efektif.

Dengan pendekatan yang tepat, sektor sawit Indonesia dapat memperkuat posisinya di pasar Nigeria dan memberikan kontribusi positif bagi ekonomi kedua negara. (MAS)

B50 Tahun Depan, Sebaiknya Ditunda?

Pencanangan bauran minyak sawit ke dalam solar sebanyak 50 persen yang ditargetkan berjalan mulai tahun depan mendapatkan banyak tantangan. Rasionalitas kebijakan tersebut dipertanyakan oleh banyak kalangan. Waktu persiapan yang terlalu singkat juga dinilai menjadi penghalang utama.

Sebagaimana diwartakan oleh banyak media, presiden terpilih RI, Prabowo Subianto yang akan mulai memangku jabatan mulai akhir Oktober ini sudah mulai mencanangkan bauran solar dengan minyak sawit yang dikenal dengan B50. Tidak main-main, Prabowo membuat rencana ambisius pada akhir tahun ini atau paling lambat awal tahun depan, B50 mulai tersalurkan ke seluruh wilayah Indonesia. Kegiatan ini dinilai dapat membuat anggaran pemerintah hemat sebesar US\$ 20 miliar atau sekitar Rp 309,7 triliun.

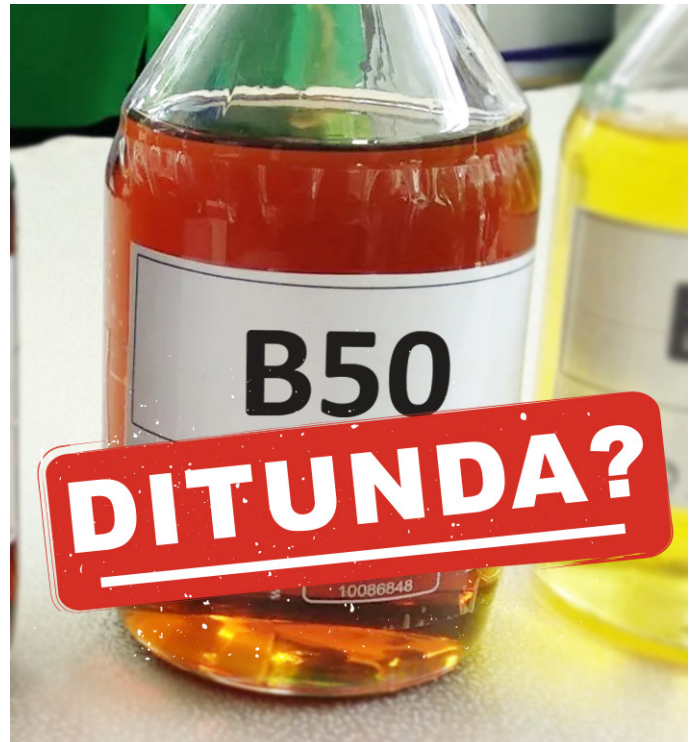
“Kita sebentar lagi tak perlu impor solar lagi, solar kita akan datang dari yang namanya kelapa sawit, namanya biodiesel. Sekarang kan B35, kita akan percepat jadi B40, B50 minimal. Dengan capaian B50, biodiesel 50% dari kelapa sawit, begitu capai itu insyaallah akhir tahun ini atau awal tahun depan, kita akan hemat US\$ 20 miliar,” ujar Prabowo saat memberikan sambutan dalam Penutupan Kongres PAN 2024, sebagaimana dikutip detik.com Minggu (25/8/2024).

Alih-alih mendapatkan respon positif, pernyataan Prabowo tersebut justru memantik polemik diantara para ahli. Banyak yang menyatakan bahwa ambisinya tersebut tidak mendasarkan pada produktivitas di lapangan yang cenderung stagnan. Atau, walaupun kebijakan itu dipaksakan maka beresiko pada sektor lainnya, yakni bidang ekspor yang menghasilkan devisa dan bahan pangan yang menjadi kebutuhan banyak masyarakat.

Bahkan salah satu pejabat yang paling kompeten seperti Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono pun menilai target tersebut tidak mungkin tercapai. Menurutnya, diperlukan uji coba terlebih dahulu sebelum implementasi. Karenanya, kalau targetnya awal tahun depan menjadi sangat sulit terlaksana.

“Rasanya tidak mungkin kalau awal tahun depan, kenapa? Itu kan butuh uji coba. Nggak mungkin uji coba di 4 bulan itu. Jadi harus, paling tidak 2025 itu udah mulai uji coba. Ya paling memungkinkan ya mungkin di awal tahun 2026 baru bisa,” kata Eddy kepada detikcom, Jumat (30/8/2024).

Meskipun demikian, target B50 ini dikatakan dapat menjadi stimulan positif agar terjadi peningkatan produktivitas sawit, terutama sawit rakyat, yang selama ini banyak dinilai produktivitasnya rendah. Masih banyak lahan sawit rakyat yang dimasukkan dalam kawasan hutan secara sepihak oleh Pemerintah sehingga tidak bisa melakukan peremajaan sawit (replanting) serta mengakses bantuan Pemerintah



Ilustrasi B50 ditunda. (dok. istimewa)

melalui BPDPKS ataupun perbankan. Kenyataan ini justru membuat tanah tidak produktif dan petani kehilangan mata pencahariannya.

Hal itulah yang dikatakan kendala paling mendasar yang menghalangi pelaksanaan bauran diesel dari B35 menjadi B40 dan B50. Produktivitas yang rendah perlu dipacu dan tanah-tanah petani yang dicatat dalam kawasan hutan perlu diatur kembali. Dengan demikian, inilah yang dimaksud perlunya waktu untuk menata baik aturan maupun tata kelola sawit. Bahkan walaupun sudah selesai dengan penataan itu, maka untuk penanaman hingga menghasilkan sawit masih memerlukan waktu kisaran 3 tahun.

Bahkan ada pakar sawit yang menyarankan agar lebih berhati-hati dalam menentukan B50 di tahun depan. Sebab sawit kita yang relatif terbatas tersebut sangat diperlukan untuk meraup devisa melalui ekspor, maupun hilirisasinya untuk kebutuhan pangan dan aneka bahan lainnya yang jumlahnya mencapai 179 produk. Memaksakan B50, bisa mengorbankan aspek ekspor dan produk-produk hilirisasi, termasuk minyak goreng.

Yang repot bila penataan lahan tersebut tidak pernah dilakukan, maka wacana yang kadang berkembang adalah ekstensifikasi lahan dengan sebagian kawasan hutan yang sudah tidak berpenutup hutan lagi. Hal ini bukan sesuatu yang haram, namun bisa dipastikan resistensi pencinta lingkungan baik dari dalam maupun luar negeri akan bergaung sangat nyaring. (AM)

Benarkah Sawit Malaysia Unggul dari Sawit Kita?



Pekerja mengangkut TBS di Kebun Sawit (dok. SawitFest-2021)

Dalam kancah persaingan antar produsen minyak sawit, Indonesia telah berhasil melampaui negara jiran, Malaysia. Lahan sawit Indonesia secara resmi dikatakan seluas 16,38 juta hektar, sedangkan Malaysia hanya 5,7 juta hektar. Meskipun secara luas lahan jauh lebih sempit, terdapat catatan beberapa keunggulan sawit Malaysia.

Menurut Derom Bangun, mantan Ketua Umum Gabungan Asosiasi Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) dan Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI), keunggulan Malaysia terletak pada beberapa aspek, seperti produktivitas, riset, promosi, tata kelola, atensi terhadap petani sawit, hilirisasi, dan pengolahan sawit dalam satu atap.

Sebagaimana dilansir oleh Info Sawit, 4 Februari 2024, produktivitas sawit Malaysia bisa dibilang melejit jauh dari Indonesia. Hasil panen per hektar di negeri jiran bisa mencapai 4-6 ton, sementara di tempat kita rerata baru antara 3,5-3,6 ton saja. Produksi yang tinggi tersebut pastinya tidak terlepas dari riset, pengembangan bibit serta penambahan bobot buah sawit sendiri. Lembaga riset seperti PORIM (*Palm Oil Research Institute of Malaysia*) dan MPOB (*Malaysian Palm Oil Board*), dikatakan memiliki peran yang tidak kecil dalam melejitkan produktivitas sawit, termasuk mendorong inovasi dan efisiensi dari semua tahapan produksi.

Selain itu, Pemerintah Malaysia konon memiliki perhatian yang cukup atas tata kelola dan nasib petani sawit. Melalui organisasi seperti FELDA (*Federal Land Development Authority*), para petani diberikan penyuluhan dan akses yang mudah dalam layanan perbankan. Dengan demikian, petani merasa terbantu dan tidak mengalami kesulitan yang berarti, serta memiliki kesempatan untuk pengembangan usahanya. Sistem ini kemudian dikenal dengan istilah “jemput bola”.

Di sisi lain, sebagian petani sawit Indonesia, kadangkala kurang mendapatkan penyuluhan bahkan tentang *Good Agricultural Practices* (GAP) dan tidak mudah mengakses

sistem perbankan sebagai akibat sebagian lahannya (terkadang) masuk dalam kawasan hutan. Tata kelola lahan yang tumpang tindih menyebabkan pemilik lahan dalam keadaan tidak menentu. Petani sawit yang menguasai kisaran 42 persen lahan itu akhirnya tidak mampu menghasilkan sawit yang berkualitas untuk dapat bersaing dengan produk asing seperti Malaysia.

Malaysia juga memiliki skema stabilisasi harga. Menggunakan pajak dan iuran dari pengusaha sawit, Pemerintah ikut serta dalam memonitor pasar sehingga terjadi stabilitas harga yang sangat dibutuhkan oleh para pelaku usaha di bidang sawit. Pengusaha dapat memprediksi usahanya dan konsumen pun mendapatkan harga yang stabil. Di sisi lain, pasar sawit Indonesia relatif dilepas bebas sesuai respon pasar (hukum permintaan dan penawaran) sehingga terjadi fluktuasi harga.

Hal terakhir yang menjadi keunggulan Malaysia adalah dalam hal hilirisasi. Dengan SDM yang relatif andal, riset yang kuat, didukung oleh investasi dan kolaborasi, maka hilirisasi produk sawit di Malaysia melebihi Indonesia.

Dalam hal hilirisasi CPO misalnya, Malaysia mencapai 100 produk sedangkan Indonesia baru 47 produk turunan. Dalam beberapa pemberitaan, turunan sawit Malaysia keseluruhan telah mencapai 260 produk di tahun 2022 sedangkan Indonesia baru 179 produk. Semakin banyak produk turunan artinya manfaat dan kesempatan keuntungan yang bisa diraih juga relatif lebih baik.

Plt. Ketua DMSI, Sahat Sinaga, sebagaimana diberitakan Bisnis.com (1/1/24) tak menampik bahwa teknologi pengolahan sawit di Malaysia lebih maju dibandingkan yang dimiliki Indonesia. Hal ini lantaran iklim usaha di Malaysia yang disebut lebih terjamin keamanan serta keteraturan regulasinya. Sahat menyebut teknologi pengolahan sawit Malaysia sudah mampu menghasilkan tocotrienol yang harganya mencapai US\$800 per 1 kilogram. (AM)

Bayang-Bayang Gagalnya Pelaksanaan EUDR Makin Terang

Tenggat waktu *full implementation* daripada *European Union Deforestation-free Regulation* (EUDR) tinggal menghitung beberapa minggu kedepan. Bukannya kepastian yang muncul, namun yang datang justru tantangan yang semakin besar baik dari dalam maupun luar. Akibatnya, aturan ini bisa jadi harus mengalami pengunduran pelaksanaannya.

Dengan lantang EU mengeluarkan statement bahwasanya mereka akan menerapkan EUDR pada akhir 2024. Aturan tersebut menolak produk terkait deforestasi yang berlangsung setelah tanggal 31 Desember 2020. Kabarnya bertujuan untuk mendukung lingkungan hidup yang lebih baik, termasuk mengurangi deforestasi. Alih-alih mendapatkan dukungan, aliran penolakan justru terus berkembang hingga saat ini, sehingga banyak pihak menyangsikan pelaksanaannya akan mulus.

“No one is ready now,” ujar Dubes RI Untuk Uni Eropa (2016-2020) Yuri Octavian Thamrin dalam sebuah wawancara podcast dengan media Kumparan di Jakarta awal bulan September ini. Yuri sangat yakin bahwa Uni Eropa sendiri tidak siap dengan segepok persyaratan yang akan mereka terapkan termasuk kesigapan perangkat-perangkatnya. Bahkan ia katakan, negeri sekamipun Amerika pun menyatakan tidak mampu memenuhi unsur keterlelusuran sebagaimana yang diatur. Demikian juga negeri lain seperti Tiongkok, India termasuk Indonesia. Dengan kata lain, EUDR sementara ini bersifat utopia.

EUDR diibaratkan oleh Yuri sebagai sebuah *nightmare*. Tidak hanya bagi para petani namun juga perusahaan-perusahaan besar di Amerika Serikat. “Kalau perusahaan dari Amerika Serikat saja tidak mampu, apalagi perusahaan kita,” ujarnya.

Bagi Indonesia sendiri, EUDR juga dinilai mengecilkan berbagai upayadankomitmenIndonesia dalam menyelesaikan permasalahan yang menyangkut isu perubahan iklim hingga perlindungan keanekaragaman hayati sesuai dengan kesepakatan, perjanjian, dan konvensi multilateral. Indonesia telah memiliki aturan yang dikenal dengan ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil) guna menjadikan kelapa sawit sebagai tanaman yang tetap ramah lingkungan dan memberikan perlindungan terhadap ekosistem yang ada.

Tidak heran jika kemudian Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sendiri mengatakan Indonesia menjadi negara yang terdepan dalam menyerukan perhatian yang serius dan ketidaksetujuan kepada UE atas tindakan diskriminasi terhadap kelapa sawit dengan adanya EUDR tersebut (Ekon.go.id, 24/4/24).



Ilustrasi kegagalan EUDR (dok. istimewa)

Selain Indonesia yang merupakan produsen sawit terbesar di dunia, negeri jiran Malaysia juga menyerukan hal yang sama. Kedua negara getol memperjuangkan sawit mereka agar tetap diterima di Eropa mengingat alasan bahwa EUDR merupakan aturan yang sangat rumit dan setiap negara telah memiliki kebijakan tersendiri dalam perlindungan lingkungan dan aneka ragam hayatinya.

Bahkan, dilansir melalui mypalmoilpolicy.com, kelompok bipartisan baik dari Partai Republik dan Demokrat juga telah menyoroti kebijakan EUDR yang dianggap tidak adil bagi para petani yang akan memasuki pasar Eropa. Dikatakan, penundaan implementasi atau perubahan regulasi EUDR menjadi salah satu opsi yang dapat dilakukan untuk saat ini. Lebih lanjut, pernyataan keberatan terhadap kebijakan EUDR juga sejalan dengan pandangan Menteri Pertanian UE.

Selain itu, sebanyak 20 dari 27 Menteri juga menyerukan untuk dilakukan penundaan EUDR, pada Pertemuan Dewan Agriculture Fisheries Council Configuration (AGRIFISH) yang telah diselenggarakan beberapa waktu lalu. Lebih lanjut, asosiasi pertanian yang terkemuka di Uni Eropa, Copa Cogeca, juga telah menyampaikan saran penundaan implementasi kebijakan EUDR.

Dalam pandangan Yuri O. Thamrin, meskipun demikian banyak yang tidak sepakat terhadap pelaksanaan EUDR, namun UE sebagai kumpulan negara-negara “kuat”, tidak akan pernah mau kehilangan “muka”. Melalui negosiasi-negosiasi bilateral dan multilateral akan terjadi sebuah equilibrium baru yang bisa menyelamatkan “muka” masing-masing. Entah apa itu formulasinya. Kita tunggu saja. (MAS)

Buku Sawit Terbaru: Ajak Semua Pihak Berjuang



Diskusi panel saat peluncuran buku "Sawit, Anugerah yang Perlu Diperjuangkan" (dok. IPOSS)

"Sawit, Anugerah yang Perlu Diperjuangkan" adalah buku yang isinya terbilang tidak terlalu panjang, alias singkat namun padat dan lugas. Terdiri dari empat bab dengan total 200 halaman. Ukurannya yang 14 cm x 21 cm membuat buku ini menjadi cukup mungil sehingga pas di tangan dan mudah dibawa. Disini Anda diajak berkenalan lebih dalam dengan dunia sawit Indonesia.

Secara umum buku menjelaskan bagaimana perkembangan serta tantangan yang dihadapi industri kelapa sawit Indonesia dari masa ke masa. Perlu diketahui bahwa belum banyak buku yang menguraikan perkembangan sejarah kelapa sawit secara lengkap disertai dengan data-data angka. Sejarah kelapa sawit dari mulai masuk ke Indonesia, periode pengembangan awal, pertumbuhan luas lahan sawit, sampai menjadi produk ekspor dan booming di Indonesia dituangkan secara ringan dan jelas sehingga mudah dipahami.

Informasi tentang perdagangan komoditas kelapa sawit serta persaingannya dengan komoditas minyak nabati lainnya juga diungkap dengan data yang lumayan rinci. Hal ini dikarenakan tim penyusun buku merupakan para peneliti *Indonesia Palm Oil Strategic Studies* (IPOSS) yang senantiasa mengolah data-data terkait kebijakan industri kelapa sawit. Dengan demikian pembaca tidak hanya mendapatkan kesimpulan-kesimpulan yang berupa argumentasi, namun juga dapat memahami dinamika angkanya melalui tabel-tabel, diagram, serta grafik yang ada di dalam buku.

Substansi semakin kuat pada pembahasan bab kedua dan bab ketiga, khususnya mengenai tantangan-tantangan serius yang dihadapi industri tersebut serta bagaimana hal itu dapat ditangani dengan tepat. Lagi-lagi, dengan penyampaian yang lugas disertai data, informasi tentang

problematisa kelapa sawit dari waktu ke waktu yang sebetulnya rumit menjadi mudah untuk dicerna, bahkan bagi pembaca pemula tentang industri kelapa sawit sekali pun.

Buku yang baru diluncurkan pada 5 September lalu ini menggarisbawahi peran signifikan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Dijelaskan secara detail bagaimana langkah-langkah yang dilakukan BPDPKS dalam menyelamatkan industri kelapa sawit yang sempat goyah pada periode 2011-2015. Berkat kebijakan-kebijakan BPDPKS yang didirikan tahun 2015, industri sawit Indonesia bisa bangkit dan menorehkan prestasinya sebagai satu-satunya komoditas perkebunan yang menjadi penopang utama ekonomi perekonomian bangsa.

Pada bab terakhir, pembaca akan menangkap pesan utama yang disampaikan yaitu mengajak berbagai pihak untuk sama-sama memperjuangkan industri kelapa sawit. Meskipun buku ini banyak menyampaikan perkembangan-perkembangan positif industri kelapa sawit, tetapi di saat yang sama juga menegaskan bahwa beberapa permasalahan perlu menjadi perhatian serius karena sangat menentukan keberlangsungan sawit. Bila tidak, bukan mustahil industri ini akan redup seperti komoditas lainnya seperti teh dan karet yang dahulu menjadi primadona negeri ini.

Buku "Sawit, Anugerah yang Perlu Diperjuangkan" tampaknya layak menjadi bacaan khalayak umum. Pembaca awam dapat memahami industri kelapa sawit dari A sampai Z secara garis besar. Sebagai referensi dasar pengetahuan tentang kebijakan terkait industri kelapa sawit, buku tersebut juga terbilang cukup komprehensif. Meski beberapa pembaca memberikan komentar bahwa buku perlu dipertajam lagi, khususnya dalam membahas permasalahan sawit rakyat. (AM)

Baru: Marka Jalan Ramah Lingkungan dari Sawit

Julukan *miracle crop* alias tanaman ajaib bagi tanaman sawit tampaknya tidak berlebihan. Dari waktu ke waktu, seiring perkembangan riset dan teknologi, semakin banyak produk bermanfaat dengan kualitas tinggi bisa dihasilkan dari tanaman berbahasa Latin *Elaeis Guineensis Jacq* tersebut. Yang terbaru, inovasi yang dikembangkan Institut Teknologi Bandung (ITB) dalam pembuatan cat marka jalan yang ramah lingkungan dari produk samping kelapa sawit.

Dikutip dari situs itb.ac.id (17/09/2024), cat marka jalan dihasilkan dari campuran gliserol yang dihasilkan dari proses produksi biodiesel sawit dan gondorukem yang diperoleh melalui proses penyulingan getah pinus. Proyek pembuatan cat marka jalan melibatkan kolaborasi antara ITB, PT Hakaaston, dan Perhutani sejak tahun 2022, dengan dukungan pendanaan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Pada 2023, tercatat dalam situs resmi ITB inovasi ini juga mendapat dukungan dari Asosiasi Inventor Indonesia yang diketuai oleh Prof. Ir. Didiek Goenadi. Uji coba saat ini dilakukan oleh operator Tol Terbanggi Besar Bakauheni di Tol Bakter yang membuat marka garis putih sepanjang 1.000 meter antara KM 125+200 hingga KM 126+200.

Aqsha, S.T., M.Sc., Ph.D., dosen peneliti dari Kelompok Keahlian Teknik Pangan dan Kemurgi ITB, menyatakan bahwa penggunaan gliserol sawit dan gondorukem untuk marka jalan sudah banyak digunakan di luar negeri, dan kini tim ITB bersama Perhutani dan Hakaaston berhasil mengembangkannya untuk diaplikasikan di Indonesia.

Sementara Ade Rintoro, Ahli Pemasaran dan Riset Pengembangan PT Hakaaston, menjelaskan bahwa penggunaan gliserol sawit dan gondorukem untuk meningkatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)

dan menawarkan solusi yang lebih ramah lingkungan dibandingkan bahan impor berbasis fosil yang sebelumnya digunakan. Harapannya, penggunaan bahan-bahan ini dapat meningkatkan kualitas dan daya tahan marka jalan, serta mendukung program ESG (*Environmental, Social, and Governance*) perusahaannya.

Dani Setyo Nugroho, GM KBM IHHBK Perhutani Jateng, menekankan pentingnya kolaborasi semacam ini yang melibatkan akademisi, industri, dan pengguna. Inovasi diharapkan dapat memberikan alternatif baru dalam pembuatan marka jalan yang berkualitas dan berharga kompetitif. Dengan Indonesia sebagai salah satu produsen terbesar sawit dan gondorukem di dunia, proyek ini berpotensi mengurangi ketergantungan pada impor bahan baku serupa.

Sebagai informasi, sebelum tahun 2010, hilirisasi minyak sawit Indonesia sebagian besar dilakukan oleh negara-negara importir minyak sawit. Kondisi tersebut membuat Indonesia tergantung pada pasar minyak sawit dunia dan nilai tambah sawit dinikmati oleh negara importir yang saat itu diperkirakan mencapai US\$ 32,8 miliar per tahun. Kemampuan hilirisasi sawit nasional baru dimulai setelah tahun 2015, setelah diintegrasikannya kebijakan hilirisasi sawit domestik dengan kebijakan perdagangan internasional yakni pungutan ekspor minyak sawit.

Untuk memastikan kemajuan hilirisasi produk kelapa sawit serta komoditas lainnya, Pemerintah perlu memberikan dukungan kepada industri hilir, seperti infrastruktur, listrik, pasokan gas serta soal-soal teknis seperti perizinan investasi. Dengan demikian, CPO yang selama ini lebih banyak diekspor dapat diolah menjadi produk bernilai tambah serta mengatasi ketergantungan impor. (MAS)



Marka Jalan Tol Bakter Gunakan Gliserol Sawit dan Getah Pinus (dok. SawitKita)

Menuju B50: Risiko Kerusakan Lingkungan Global

Indonesia sebagai produsen *Crude Palm Oil* (CPO) terbesar di dunia memainkan peran penting dalam memasok kebutuhan CPO global. Menurut data GAPKI, total ekspor produk kelapa sawit Indonesia, mulai dari CPO, CPKO, hingga oleokimia dan biodiesel mencapai 32,2 juta ton pada tahun 2023. Namun, produksi CPO Indonesia dalam beberapa tahun terakhir cenderung stagnan di kisaran 50 juta ton per tahun. Bahkan, produksi CPO hingga Juni 2024 hanya mencapai 23,9 juta ton, turun 1 juta ton dibandingkan periode yang sama di tahun 2023 yang mencapai 24,9 juta ton.

Di tengah stagnasi tersebut, pemerintah berencana meningkatkan bauran biodiesel dari B35 menjadi B50 pada tahun 2025. Artinya, biodiesel akan mengandung 50% CPO dan 50% bahan bakar diesel konvensional. Rencana ini mencerminkan komitmen Indonesia terhadap keberlanjutan energi dan pengurangan emisi karbon. Namun, peningkatan kebutuhan domestik untuk biodiesel dikhawatirkan tidak hanya akan mengurangi volume ekspor CPO, tetapi juga berpotensi mendorong kerusakan lingkungan di berbagai belahan dunia. Mengapa demikian?

Secara umum, pemanfaatan CPO di Indonesia terbagi menjadi empat sektor utama: pangan, oleokimia, biodiesel, dan ekspor. Alokasi CPO untuk pangan dan oleokimia tidak mungkin dialihkan untuk kebutuhan lain. Sehingga, peningkatan bauran biodiesel kemungkinan akan mengambil alokasi CPO untuk ekspor. Berdasarkan data terbaru GAPKI, ekspor produk kelapa sawit Indonesia hingga Juni 2024 hanya mencapai 15 juta ton, turun 1,3 juta ton dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yakni 16,3 juta ton. Penurunan ekspor ini berpotensi menyebabkan kelangkaan pasokan CPO di pasar global, yang dapat memicu kenaikan harga CPO dunia.

Meningkatnya harga CPO internasional yang terlalu tinggi dapat memaksa negara-negara yang bergantung pada impor CPO seperti Pakistan, India, dan RRC untuk mencari sumber

alternatif. Sebagai contoh, pemerintah India telah memiliki program nasional pemberian subsidi untuk penanaman kelapa sawit. Padahal pada praktiknya, kondisi iklim dan geografis India menyebabkan produktivitas kelapa sawit di negara tersebut tidak bisa maksimal.

Lebih lanjut, beberapa negara akan melihat berkurangnya pasokan CPO dari Indonesia sebagai peluang untuk mengambil alih pasar CPO dunia. Dorongan untuk memperluas lahan perkebunan kelapa sawit dapat timbul pada negara-negara yang telah menjadi pemasok CPO global. Bukan tidak mungkin juga bahwa negara pemasok minyak nabati lain yang mengambil upaya untuk meningkatkan substitusi pada penggunaan minyak sawit. Hal ini dapat menyebabkan deforestasi lebih lanjut pada negara-negara tersebut.

Selain dampak lingkungan, pemerintah juga perlu mempertimbangkan produktivitas lahan sawit Indonesia sebelum menerapkan kebijakan B50. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan CPO, pemerintah perlu mengakselerasi program-program yang bertujuan untuk meningkatkan produksi CPO seperti Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dan penyelesaian tata kelola kawasan hutan. Melalui peningkatan produksi tanpa harus membuka lahan baru, Indonesia dapat memenuhi kebutuhan CPO domestik untuk B50 tanpa mengorbankan ekspor dan memicu ekspansi sawit di negara lain. Selain itu, pemerintah perlu mengkaji potensi penggunaan bahan baku limbah untuk membuat biodiesel, seperti POME dan minyak jelantah.

Pemerintah juga diharapkan untuk lebih bijak dalam menaikkan angka bauran biodiesel. Pertimbangan menyeluruh terhadap dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan harus menjadi prioritas utama sebelum kebijakan ini diimplementasikan. Dengan demikian, Indonesia dapat memainkan peran kunci dalam mencapai keseimbangan antara ketahanan energi dan pelestarian lingkungan di dunia. (RFY)



Ilustrasi pengungulan hutan (dok. PixaBay)

Research

HVO sebagai Masa Depan Biodiesel: Apakah Indonesia Siap?



Ilustrasi green biofuel (dok. crownoil)

Indonesia telah menjadi salah satu negara dengan bauran biodiesel terbesar di dunia, memanfaatkan minyak kelapa sawit sebagai bahan baku utama untuk biodiesel FAME (*Fatty Acid Methyl Ester*). Hingga tahun 2024, Indonesia telah menerapkan bauran 35% biodiesel (B35) dan berencana meningkatkan pencampuran ini menjadi 40% (B40) pada Januari 2025. Presiden terpilih Indonesia, Prabowo Subianto, telah menetapkan target ambisius untuk mencapai B50 pada akhir 2025 atau awal 2026. Langkah ini diambil untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan mendukung transisi energi yang lebih ramah lingkungan.

Namun, penelitian Babji et al. (2024) menunjukkan bahwa pencampuran FAME pada diesel mencapai titik optimal pada 30%. Pencampuran di atas 30% tanpa perlakuan yang tepat dapat berdampak negatif pada kinerja mesin diesel. Hal ini membuka peluang untuk memanfaatkan bahan bakar yang lebih stabil, seperti *Hydrotreated Vegetable Oil* (HVO), yang dinilai lebih efisien dan ramah lingkungan dalam konsentrasi yang lebih tinggi.

FAME telah menjadi biodiesel utama di Indonesia karena ketersediaan minyak kelapa sawit yang melimpah dan kemampuannya menurunkan emisi gas rumah kaca. Namun, secara teknis, FAME memiliki kelemahan seperti kestabilan oksidasi yang rendah dan kandungan oksigen tinggi, yang dapat menyebabkan korosi dan masalah pada mesin diesel. Di sinilah HVO menawarkan keunggulan. Diproduksi melalui proses hidrogenasi minyak nabati, HVO menghilangkan kandungan oksigen dan menghasilkan bahan bakar dengan karakteristik yang lebih mirip diesel fosil. HVO lebih stabil secara oksidatif dan termal, memiliki viskositas yang lebih baik pada suhu rendah, dan angka cetane yang lebih tinggi, sehingga menghasilkan pembakaran yang lebih efisien dan lebih ramah terhadap mesin.

Studi *European Renewable Energy Directive* (RED II) menunjukkan bahwa HVO tidak hanya lebih baik untuk mesin tetapi juga menghasilkan emisi yang lebih rendah dibandingkan FAME. Penggunaan HVO yang berasal dari limbah minyak nabati atau minyak bekas (UCO) dapat mengurangi emisi karbon dioksida (CO_2) hingga 80% dibandingkan diesel fosil. Dengan kestabilan yang lebih baik, HVO dapat dicampur dalam konsentrasi lebih tinggi tanpa menimbulkan masalah teknis, sehingga menjadikan alternatif yang lebih menarik dalam meningkatkan bauran biodiesel di Indonesia.

Meski demikian, adopsi HVO di Indonesia menghadapi beberapa tantangan, terutama dalam hal ketersediaan bahan baku dan teknologi pengolahan. Dalam hal bahan baku, pemanfaatan minyak sawit sebagai bahan baku B50 pada akhir 2025 dipandang sulit dicapai. Apkasindo (Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia) menyatakan bahwa pertumbuhan produktivitas perkebunan saat ini masih rendah, sehingga target ini menjadi tantangan besar. Di samping itu, pemanfaatan minyak jelantah sebagai bahan baku HVO juga berpotensi berkompetisi dengan kebutuhan untuk bahan bakar penerbangan alternatif (*Sustainable Aviation Fuel*/SAF). Dari sisi teknologi, kapasitas pabrik pengolahan HVO di Indonesia masih terbatas. Saat ini, Pertamina tengah mengembangkan Kilang HVO di Cilacap dengan kapasitas 6.000 kilobarel per hari. Namun, kemampuan kilang untuk memproduksi HVO kemungkinan akan bersaing dengan kebutuhan untuk memproduksi SAF, mengingat target dekarbonisasi sektor aviasi Indonesia. Oleh karena itu, dibutuhkan investasi besar untuk membangun infrastruktur yang mendukung produksi skala besar HVO.

Proses produksi HVO sendiri lebih kompleks dibandingkan FAME. Argus Media pada April 2024 menyatakan harga HVO di Singapura mencapai 1.405 USD/ton, sementara harga FAME adalah 1.070 USD/ton. Perbedaan harga sebesar 31% ini memunculkan tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam menjaga keseimbangan harga bahan bakar dan daya beli konsumen. Untuk mendukung penerapan HVO secara lebih luas, diperlukan strategi pendanaan yang mencakup subsidi atau insentif fiskal lainnya. Pengalaman dari Uni Eropa menunjukkan bahwa subsidi sebesar 20-30% dari total biaya produksi diperlukan untuk menjaga harga HVO tetap kompetitif dengan bahan bakar diesel fosil.

Transisi dari FAME ke HVO menawarkan peluang besar bagi Indonesia untuk mempercepat program biodiesel dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Namun, diperlukan perencanaan yang matang, investasi yang signifikan, serta kebijakan yang mendukung agar transisi ini berkelanjutan. Dengan kebijakan subsidi yang tepat, peningkatan investasi di sektor HVO, dan kajian yang menyeluruh terhadap kebutuhan bahan baku, Indonesia dapat memanfaatkan potensi HVO untuk mendukung transisi energi hijau sekaligus memperkuat posisinya dalam pasar energi global. (DS)

Kelapa Sawit: Soko Guru Ekonomi Bangsa



Ilustrasi CPO penopang ekonomi Indonesia (dok. APROBI)

Kelapa sawit adalah tanaman penghasil minyak nabati yang dapat diandalkan dan telah memainkan peran penting dalam ekonomi Indonesia. Tanaman ini berkontribusi pada pendapatan nasional, menciptakan lapangan pekerjaan, dan menghidupi jutaan petani, sehingga telah berhasil meningkatkan kesejahteraan nasional.

Pada tahun 2023, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menyumbang 12,53% dari PDB Indonesia, menempati urutan ketiga setelah Industri Pengolahan dan Perdagangan Besar. Di antara komoditas sektor ini, minyak kelapa sawit menyumbang sekitar 3,5% dari PDB.

Dalam aspek perdagangan internasional, minyak kelapa sawit merupakan penyumbang ekspor sektor non migas. Sejak tahun 2007, nilai kontribusi kelapa sawit terhadap ekspor non migas bernilai lebih dari 10%. Di tahun 2023, aktivitas perdagangan ini memberikan sumbangan devisa sebesar 30,6 juta ton atau USD 26.5 miliar atau setara dengan Rp 404,3 triliun.

Hal yang tidak kalah penting adalah, selain memberikan nilai melalui indikator ekonomi. Kelapa sawit juga mampu memberikan pendapatan negara melalui Pungutan Ekspor (PE) dan Bea Keluar (BK), yang mampu menghasilkan pendapatan sebesar ± 285 triliun dari tahun 2016 – 2023.

Affandi (2023) menghitung indeks multiplier untuk komoditas kelapa sawit. Berdasarkan perhitungannya, sektor minyak

sawit mentah memiliki nilai pengganda output terbesar dibandingkan dengan komoditas lainnya. Dengan pengganda output sebesar 2,09, ini berarti bahwa setiap peningkatan permintaan akhir sebesar Rp 1 juta akan menyebabkan total output seluruh sektor dalam perekonomian meningkat sebesar Rp 2,09 juta.

Secara signifikan, industri kelapa sawit juga merupakan pemberi lapangan pekerjaan yang besar, dengan estimasi mencapai 18,8 juta tenaga kerja. Dampak pembangunan ekonomi juga dapat dilihat pada PDRB daerah penghasil sawit seperti Riau, Kalimantan Tengah, dan Sumatera Utara.

Namun, meskipun kelapa sawit memberikan banyak manfaat ekonomi, ada tantangan signifikan yang perlu diatasi, terutama terkait isu lingkungan dan sosial. Pembukaan lahan untuk perkebunan seringkali dikaitkan dengan deforestasi, hilangnya keanekaragaman hayati, dan konflik lahan dengan masyarakat lokal.

Untuk itu, pemerintah perlu mengedepankan kebijakan yang berkelanjutan untuk industri sawit. Termasuk diantaranya memastikan bahwa kebijakan yang memiliki indikasi tumpang tindih dapat diakomodir dengan baik. Selain itu, dialog praktis antara pihak-pihak yang terlibat, seperti Kementerian terkait, Petani, Industri, LSM, dan masyarakat sipil perlu dikedepankan agar dapat saling bahu membahu dalam mempertahankan masa depan sektor yang telah menjadi “tulang punggung” perekonomian. (Op)

Siapakah Indonesia dengan B50?

Pemerintah Indonesia melakukan *soft launching* bahan bakar campuran solar dan minyak sawit dengan rasio 50 persen (B50), pada Minggu (18/8/24). Langkah berani ini, dalam batas tertentu, bisa diartikan bahwa Pemerintah Indonesia memiliki perhatian besar terhadap lingkungan. Namun di lapangan, ternyata tantangannya juga cukup berat.

Adalah Menteri Pertanian, Amran Sulaiman sendiri yang melakukan peluncuran B50 tersebut, dan dalam kesempatan itu dengan tegas menyatakan kebijakan yang dibuat Pemerintah ini bermaksud agar energi yang menjadi kebutuhan masyarakat dapat dengan mudah terjangkau dan ramah lingkungan. Lebih lanjut dikatakan bahwa B50 dapat mengurangi emisi karbon sekaligus menekan defisit perdagangan nasional.

Sebagaimana dikutip oleh media online Kontan.co.id (20/08/24), Amran menegaskan bahwa biodiesel B50 dapat menghemat devisa negara yang biasanya digunakan untuk impor solar, yang membebani keuangan negara sebesar Rp 300-400 triliun per tahun. Disisi lain, penggunaan minyak B50 ini pada dasarnya juga dapat mengurangi tekanan pihak asing yang kadang mengembuskan isu-isu negatif sehingga ekspor sawit kita menjadi terganggu serta menciptakan image yang kurang baik bagi bangsa.

“Saat ini, kami bertugas untuk memastikan kesiapan pemerintah dalam implementasi program Biodiesel B50, tidak hanya dari sisi suplai bahan baku Crude Palm Oil (CPO), tetapi juga dalam skala yang lebih luas,” tukasnya.

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) misalnya, memberikan apresiasi terhadap upaya pemerintah dalam meningkatkan nilai tambah kelapa sawit melalui peluncuran Biodiesel 50 (B50). Meskipun demikian, Direktur Eksekutif GAPKI, Mukti Sardjono, menekankan bahwa tantangan pertama dalam melanjutkan program ini adalah peningkatan produktivitas sawit, yang salah satunya dapat dicapai melalui program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Mukti mungkin hanya ingin mengatakan bahwa bahan baku di lapangan tidak mencukupi, kecuali dengan menggenjot produksi sawit yang tidak akan dapat dilakukan dalam waktu singkat.

Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono, sebagaimana ditulis oleh Antara (21/08/24)

memberikan pernyataan yang mirip disampaikan oleh GAPKI, yakni pentingnya meningkatkan produktivitas tanaman sawit, guna memajukan industri biodiesel dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Dalam kunjungan kerja di Pasar Minggu, Jakarta, Sudaryono menyatakan bahwa peningkatan produktivitas CPO memerlukan pemilihan bibit sawit unggul dan berkualitas, serta

penggunaan teknik perawatan dan data sensor yang baik. Upaya peningkatan produktivitas sawit melalui peremajaan atau replanting juga memerlukan proses yang tidak mudah serta waktu yang tidak singkat. Hasil dari replanting baru akan dirasakan dampaknya sekitar 4-5 tahun sejak kelapa sawit baru ditanam.

Tantangan lainnya menurut Sudaryono, bahwa B50 dapat dilaksanakan dengan sukses manakala semua kebutuhan minyak sawit untuk pangan dan kebutuhan primer lainnya terpenuhi. Bagaimana pun, keseimbangan antara kebutuhan pangan dan energi harus menjadi perhatian bersama. “Karena kan

pasti kalau kita sumber daya itu yang pertama adalah konversi terhadap pangan baru setelahnya kita pikirkan energi. Jadi kalau minyak goreng, semua kebutuhan minyak sawit kita untuk kebutuhan pangan dan kebutuhan primer kita beres, itu pelan pelan nanti (konversi ke energi),” kata Wamentan.

Kesulitan lainnya juga dalam hal ketersediaan pasokan CPO dimana bila alokasinya dimaksimalkan untuk kebutuhan biofuel maka ekspor otomatis akan mengalami penurunan. Sedangkan pungutan dari ekspor inilah yang selama ini digunakan untuk mensubsidi selisih harga biodiesel dengan minyak solar. Sejalan dengan yang diungkapkan oleh Ketua Umum GAPKI, Eddy Martono bahwa saat ini produksi sawit tengah mengalami stagnasi. Dengan kondisi ini, implementasi B50 akan terhambat jika ada kenaikan permintaan terhadap minyak sawit mentah (CPO) dari negara importir (Kontan.co.id, 22/8/24).

Dalam beberapa waktu mendatang, diskusi tentang B50 ini akan banyak menyita perhatian para ahli sawit. Banyak jalan yang bisa ditempuh dengan konsekuensi sendiri-sendiri. Termasuk apakah nantinya untuk meningkatkan produktivitas Pemerintah mengendorkan moratorium pembukaan lahan sawit yang akan mematikan kritik kalangan pecinta lingkungan? (AM)



Menteri Pertanian Amran Sulaiman saat Soft Launching B50 (dok. istimewa)

Dapatkah PSR 60 juta Mampu Mendongkrak Produktivitas?



Pohon kelapa sawit yang siap untuk di-replanting (dok. BDPKPS)

Sejak 1 September 2024, melalui keputusan Direktur Utama BDPKPS No 252/dpks/2024, bantuan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dari Rp 30 juta menjadi Rp 60 juta per hektare sah mulai berlaku. Pemerintah berharap, pekebun sawit rakyat yang selama ini merasa kekurangan dana mulai tersenyum riang. Masalahnya, apakah PSR Rp 60 juta itu bisa diharapkan menjadi solusi produktivitas?

Secara teori, bantuan PSR yang baru ini merupakan sebuah kabar gembira. Bagaimana tidak, petani yang biasanya kesulitan dana saat melakukan *replanting*, kini bak mendapatkan durian runtuh. Selama menunggu masa panen yang biasanya baru mulai tahun ketiga atau keempat, kini mereka memiliki bekal cukup untuk membeli pupuk hingga memenuhi kebutuhan dapur keluarga. Rp 60 juta bagi petani adalah *matter*.

Petani atau pekebun sawit yang menguasai 41 persen dari luasan sawit di Indonesia pastilah memiliki peranan yang tidak kecil dalam menggenjot produktivitas sawit. Apalagi dalam beberapa tahun terakhir produktivitas sawit dirasakan sudah sulit naik (stagnan), bahkan cenderung turun. Itu semua akibat sebagian pohon sawit rakyat sudah menua, kurang produktif, namun belum bisa dilakukan replanting karena tidak adanya dana yang mencukupi.

Mekanisme yang diterapkan oleh BDPKPS dalam menebus uang PSR sering dikatakan sudah lebih mudah, tidak berbelit-belit. Bahkan diantaranya sudah bersifat online. Tampaknya semua menyadari bahwa tanpa peningkatan produktivitas maka banyak target tidak tercapai. Program B50 misalnya, konon kabarnya terkendala oleh jumlah produksi CPO yang terbatas. Jika B50 dipaksakan, bisa jadi harus mengorbankan ekspor, atau malah hilirisasi di dalam negeri tersendat. Disinilah pentingnya PSR Rp 60 juta, sehingga diharapkan dalam waktu 3 tahun ke depan, produksi sawit mulai meningkat lebih signifikan..

PSR Vs Kawasan Hutan

Sudah bukan barang baru lagi untuk mengatakan bahwa sebagian lahan sawit rakyat berada di kawasan hutan. Bukan hanya itu, tidak sedikit desa di Indonesia tiba-tiba berada di dalam wilayah hutan. Padahal sejak dahulu kala merupakan desa yang berpenghuni penduduk desa.

Tumpang tindih pengaturan pertanahan nasional telah menimbulkan mislokasi lahan, hambatan pembangunan sektor tanaman pangan, ketimpangan pembangunan antar wilayah, ketidakpastian hak atas tanah, dan akhirnya menghambat pembangunan secara keseluruhan. Situasi semacam ini telah berjalan puluhan tahun sehingga semakin mengancam ketahanan nasional khususnya dari aspek pangan.

Menurut informasi yang dihimpun IPOSS, luasan kawasan hutan Indonesia (di luar kawasan konservasi perairan) yakni 120 juta hektar. Luas area kawasan hutan yang sudah tidak berpenutup hutan ekologis adalah 31,84 juta hektar, diantaranya terdapat 2,2 juta hektar milik petani sawit dan 1,2 juta hektar milik perkebunan besar.

Meskipun petani pada dasarnya memiliki hak untuk menikmati PSR sebanyak Rp 60 juta per hektar, namun mereka yang dinyatakan masuk kawasan hutan (meski tidak ada lagi hutannya), jadi tidak memenuhi syarat dasar untuk mengajukan PSR dimaksud. Dengan demikian, 2,2 juta hektar diatas hanya tinggal menunggu waktu kematian pohon-pohon sawit dan kemudian tanahnya tidak termanfaatkan dengan maksimal. Dan jika digabung dengan lahan milik perkebunan besar maka inefisiensi lahan sawit luasannya sangat besar: 3,4 juta hektar.

Semua pihak berharap, Pemerintahan baru dapat segera membenahi tumpang tindih pengaturan pertanahan nasional sehingga petani dapat ikut serta dalam mendorong produktivitas sawit dan ikut memantapkan ketahanan nasional dalam percaturan global. Tanpa pembenahan yang cepat, dikhawatirkan target PSR Rp 60 juta sulit dicapai dan produktivitas sawit kita disitu-situ saja. (AM)



Pembina: **Sofyan Djalil**, Pemimpin Umum: **Nanang Hendarsah**,
Pemred: **M. Aji Surya**, Redaktur: **Dimas HP, Ahmad Mina**,
Staf Redaksi: **Dwivayani, Oktadianti, Raisya, Aura, Sylvia**
Desain: **Denis**

Sahid Sudirman Center, Lt 16
Jl Jend. Sudirman Kav. 86, Jakarta 10220
email: info@iposs.co.id